

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Adnyani, N. K. S. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adnyani, N.K.S. 2020. *Hukum Tata Negara: Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Z. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Budiarjo, M. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djulaeka dan Rahayu, D. 2021. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fahmi, K. 2021. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, N. dan Nazriyah, R. 2020. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama.
- Huda, N.U. 2021. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Ilyas, A. 2023. *Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juliardi, B. dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama*. Jakarta: Prenanda.
- Nawawi, N. dkk. 2024. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Tinjauan dari Berbagai Perspektif*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Nur, A.R. 2018. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Prasetya, R. 2022. *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Purnama, E. 2021. *Negara Kedaulatan rakyat: Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Putra, E.J. 2019. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Redi, A, dkk. 2023. *Hukum Indonesia di Masa Depan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Safi. 2021. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya: Scorpio Media Pustaka.
- Santoso, A.P.A, dkk. *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Solikin, N. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Suparyanto, Y. 2018. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Uskono, N. 2025. *Problematika Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.
- Wibowo, W. 2018. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indocamp.
- Windari, R.A. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel dalam Jurnal

- Adnyani, NKS (2021). Larangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Bisnis* , 5 (1), 140–148.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333–341.
- Adnyani, NKS, Atmaja, GMW, & Sudantra, IK (2021). Masyarakat adat antara pengakuan dan penolakan perspektif pluralisme hukum. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius* , 8 (9), 352-362.
- Achmad dan Mulyanto. 2013. Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Yustisia*, 2(1), 57-64.

- Aditya, Z.F dan Winata, M.R. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9(1), 79-100.
- Alisandy, R. Dkk. 2024. Perang Partai Politik dalam Kekuasaan Legislatif. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 1-16.
- Azzahra, F. 2022. Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 04(02), 54-68.
- Dzulqornain, R. dan Nurrizky, R.H. 2021. Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2), 172-191.
- Fanggi, P.A.L, Ananisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas mataram*, 1(2), 2-9.
- Fathorrahman. 2021. Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *HUKMY Jurnal Hukum*, 1(1), 73-90.
- Gamas, C.G., Adnyani, N.K.S dan Hapsari, I.G.A. 2025. Implikasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati da Walikota Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak 2024 (Studi Kasus Pemilihan Kepala daerah di Kutai Barat 2024). *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern*, 9(3), 1-7.
- Ghafur, J. 2023. Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *JH Ius Quia Iustum*, 40(1), 1-25.
- Hadi, I. G. A. A., Nastiti, L., Adnyani, N. K. S., Kusuma, P. R. A., Fajar, N. M. A. P., Widiyani, I. G. A. M., ... & Haura, H. (2025). Law and Policy on AI Utilization for Good Governance in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 03010).
- Hadi, I.G.A.A, dkk. 2024. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 350 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Buleleng. *SENARI*, 9(2024), 374-381.

- Hakim, M.R. 2016. Implementasi *Rechtvinding* yang Berkarakteristik Hukum Progesif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 227-248.
- Hasim, H. 2017. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130.
- Hsb, A.M. 2022. Problematika Pengujian Formil Undang-undang. *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 13-22.
- Iqbal, F.M. 2022. Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180-200).
- Irfani, N. 2020. Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posteriore*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3), 305-325.
- Kadir, A.G. 2014. Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136.
- Luliana, I.K.A.Y, Adnyani, N.K.S dan Hadi, I.G.A.A. 2026. Implikasi Yuridis *Judicial Review* AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4775-4783.
- Lumbanraja, B. 2024. Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber dan Jurdil Untuk Menghasilkan *Vox Populi Vox Dei* Demi Kepentingan Bersama (*Bonum Commune*) Thomas Aquinas. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(2), 157-166.
- Madakarah, F.Y, Wisnaeni, F. dan Herawati, R. 2017. Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-13.
- Munawaroh, N. dan Hidayati, M.N. 2015. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22 (2), 255-268.
- Nabela, R., Soetoprawiro, K., dan Susolowati, H. 2025. Keberadaan Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR di

- Tinjau dari Prinsip Demokrasi Perwakilan. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 4(7), 4198-4220.
- Nasir, G.A. 2017. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 172-183.
- Nuridin, P.H. 2019. Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik “*Political Law Of Political Education By Pilitical parties*”. *Jambura Law review*, 1(02), 144-166.
- Putra, A. 2018. Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 69-79.
- Putra, M.A. 2020. Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal PERATUN*, 3(1), 1-18.
- Raditya, I.K.P.C, Hartono, M.S dan Adnyani, N.K.S. 2025. Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum Studi Putusan Nomor (17/Pid.sus/2019/PN Amlapura). *Jurnal Locus Delicti*, 6(2), 84-91.
- Sajian, A., Cahyowati, RR. dan Wibowo, G.D. 2023. Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 7(2), 337-343.
- Sinaga, D.S dan Syahputra, A. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 40-54.
- Sinaga, N.A, dan Atmoko, D. 2023. Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0. *Kertha Bhayangkara*, 17(1), 119-126.
- Suhaimi, E. 2021. Prinsip-prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Tripantang*, 27-51.
- Sujono, I. (2021). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 585-607.

- Sukimin, S. 2020. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 3 (1), 112-134.
- Sunarto dan Lestari, E.Y. 2024. *Judicial Review* Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundang-undangan. *Integralistik*, 35(1), 61-69.
- Syahrin, M.A., dan Sapitri, I. 2020. Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi Journal of Law*, 2(2), 146-165.
- Toloh, P.W.Y. 2023. Politik Hukum Penguatan Partai Politik untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1), 142-168.
- Ulum, M.B. 2021. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309-343.
- Wardhani, P.S.N. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 57-62.
- Wibowo, W.D.P, Nuswanto, A.H dan Junaidi, M. 2022. Mekanisme Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 392), 62-77.
- Wijaya, P.C.M, Anyani, N.K.S dan Landrawan, I.W. 2023. Penjaminan Hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 167-174.
- Yadnya, G.I.N, Hartono, M.S dan Landrawan, I.W. 2025. Implementasi Penegakan Hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunikasi Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(1), 1-18.
- Yudiawan, I.D.G.H dan Putra, I.K.T. 2021. Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 728-735.
- Yusdheaputra, W. 2023. Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurist-Diction*, 6(1), 191-214.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5440)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

